

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perang dagang ini bermula ketika Presiden Amerika Serikat Donald Trump melayangkan kebijakan tariff impor terhadap produk-produk dari Tiongkok dengan alasan adanya kecurangan dalam melakukan perdagangan internasional, yakni pencurian kekayaan hak intelektual. Namun demikian, tujuan utama Amerika Serikat melayangkan hambatan tariff terhadap Tiongkok tidak lain kecuali untuk mempertahankan hegemoni dalam sistem internasional khususnya dalam bidang ekonomi dari Tiongkok (Cahyani, 2020).

Tiongkok sebagai salah satu negara dengan perokonomian yang kuat pada awalnya memiliki kondisi perekonomian yang menghawatirkan karena adanya kegagalan pembangunan ekonomi domestiknya pada masa pemerintahan Mao Zedong yang menyebabkan 21 juta jiwa meninggal akibat bencana kelaparan. Pada masa awal proklamasi 1949, Tiongkok mengalami keterbatasan diplomatik dari dunia internasional karena adanya dorongan Amerika Serikat terhadap negara lain untuk tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Republik Rakyat Tiongkok dan memihak kepada Republik Tiongkok. Hingga setelah disahkan nya Resolusi Majelis Umum PBB 2758 yang mengakui RRT sebagai satu-satunya wakil Tiongkok yang sah, dan dilanjutkan dengan kebijakan Pintu Terbuka era Deng Xiaoping yang memfasilitasi investasi asing di *Special Economic*

Zone, hal tersebut kemudian meningkatkan kepercayaan internasional. Kepercayaan Internasional juga dipupuk oleh asertivitas Tiongkok untuk bergabung dengan lembaga-lembaga internasional seperti IMF, Bank Dunia pada 1980, dan GATT pada 1986. Selain daripada itu dengan adanya kebijakan pada era Deng Xiaoping juga memberikan pengaruh besar terhadap peningkatan perekonomian Tiongkok. Peningkatan perekonomian tersebut dapat dilihat dari meningkatnya pendapatan domestik bruto Tiongkok sejak tahun 1978 hingga 2017 dari \$175 miliar menjadi \$12 triliun dengan pertumbuhan ekonomi rata-rata tahunan sebesar 9,5% hingga menempatkan Tiongkok sebagai negara dengan perekonomian terbesar kedua di dunia setelah Amerika Serikat, bahkan terdapat beberapa analisis yang memprediksi pendapatan domestik bruto Tiongkok dapat menyamai Amerika Serikat di tahun 2019 atau 2030 apabila terus mengalami peningkatan (Korwa, 2019). Di samping itu juga, pada masa pemerintahan Presiden Xi Jinping, Tiongkok terus melakukan berbagai strategi untuk dapat memperkuat posisi dan pengaruhnya dalam dunia internasional seperti di antaranya adalah Kebijakan Jalur Sutra Tiongkok, *Made in China 2025*, hingga keterlibatan Tiongkok dalam Laut China Selatan.

Jalur Sutra Tiongkok pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Xi Jinping dalam kunjungannya ke Kazakhstan dan Indonesia. Pada 7 September 2013 dalam pidatonya di Universitas Nazarbayev, Xi Jinping mengusulkan untuk dilakukannya proyek kerjasama antara Tiongkok dengan Negara-negara Eurasia yang bertujuan untuk memperkuat hubungan Tiongkok, Asia Tengah dan Eropa dengan melalui Sabuk

ekonomi jalur sutra (*The silk road economic belt*) yang akan menjadi jalur darat dalam proyek ini, dengan pembuatan jalan raya dan jalur kereta api. Kemudian pada 3 Oktober 2013 dalam pidatonya di Parlemen Indonesia, Xi mengusulkan proyek Jalur Sutra maritim (*The 21st century maritime silk road*) yang akan menjadi jalur laut yang akan menghubungkan Tiongkok dengan Negara-negara ASEAN, Asia Selatan, Afrika, dan Eropa.

Kebijakan jalur sutra ini juga merupakan sarana bagi Tiongkok untuk semakin menunjukkan pengaruhnya di dunia internasional dan sebagai penyeimbang pengaruh Amerika Serikat di Asia-Pasifik. Selain itu dengan kebijakan ini pun Tiongkok berupaya untuk memulihkan kembali pengaruhnya di Negara-negara bekas Uni Soviet dan bahkan hingga ke Eropa Timur. Diterapkannya kebijakan ini juga didorong oleh permasalahan internal Tiongkok yakni perlunya mengamankan pasar ekspor dan mengurangi ketergantungan akan transportasi laut dengan membangun jaringan transportasi darat untuk memastikan stabilnya pasokan energi ke Tiongkok.

Kebijakan *Made in China 2025* merupakan rencana sepuluh tahun Tiongkok dalam mereformasi basis manufaktur dengan mengembangkan industri teknologi tinggi dengan cepat, khususnya dalam komoditas seperti kendaraan energi baru, teknologi informasi, AI (*Artificial Intelligence*), hingga telekomunikasi generasi mendatang. Dengan direncanakannya *Made in China 2025*, Tiongkok menargetkan untuk mencapai 70% industri teknologi tinggi mandiri sehingga dapat mengurangi ketergantungan Tiongkok terhadap produk luar. Selain itu Tiongkok juga menargetkan

untuk menjadi Negara dominan dalam pasar global pada tahun 2049 pada saat peringatan seratus tahun RRT.

Laut China Selatan merupakan wilayah perairan bagian dari Samudra Pasifik seluas 3.500.000 km² yang terletak di antara beberapa negara Asia, di sebelah utara terdapat Tiongkok dan Taiwan, di sebelah timur adalah Filipina, di sebelah barat adalah Vietnam, dan di sebelah selatan adalah Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, dan Indonesia. Wilayah ini sarat akan konflik karena terdapat banyak negara yang mengklaim atas wilayah perairan ini. Tiongkok mengklaim atas wilayah ini dengan dasar historis yang mengakui kepemilikan atas dua gugusan kepulauan Paracel dan Spratly sejak 2000 tahun yang lalu, dan bahkan pemerintah Tiongkok mengakui telah mengeluarkan peta yang berisikan rincian wilayah kedaulatan Tiongkok di Laut China Selatan atau yang dikenal dengan *Nine dashed line* pada tahun 1947. Di sisi lain Malaysia, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, dan Singapura juga mengklaim atas wilayah ini dengan dasar geografis sesuai dengan yang diakui oleh Konvensi Hukum Laut Internasional, sehingga wilayah laut tersebut jika dilihat dari hukum yang berlaku termasuk kedalam wilayah Zona Ekonomi Eksklusif negara-negara tersebut.

Selain daripada kebijakan ekonominya, kemunculan Tiongkok dalam kawasan Laut China Selatan memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap eksistensi Tiongkok di kawasan, karena kawasan Laut China Selatan merupakan wilayah spesial karena di dalamnya terdapat sumber kekayaan alam yang besar, yakni minyak dan gas bumi, serta kekayaan

dalam laut yang melimpah. Di samping itu wilayah Laut China Selatan juga merupakan jalur lintas bagi kapal-kapal internasional berlayar, dan sebagai jalur utama perdagangan ke Benua Amerika, Eropa, dan ke negara-negara Asia lainnya, sehingga wilayah ini merupakan wilayah ramai dan strategis untuk mencapai manfaat ekonomis yang sangat tinggi. Maka dari itu merupakan hal yang wajar negara-negara tersebut berupaya untuk mempertahankan dan menguasai kontrol atas wilayah ini.

Kemunculan Tiongkok sebagai negara dengan kekuatan ekonomi yang baru menjadi sebuah ancaman bagi negara-negara lain tanpa terkecuali bagi Amerika Serikat, terlebih lagi dengan kebijakan-kebijakan ini bukan tidak mungkin bagi Tiongkok menggantikan posisi Amerika Serikat untuk menjadi negara dengan perekonomian terbesar di dunia. Sehingga untuk dapat melindungi perekonomian negaranya AS melakukan proteksionisme yang kemudian menjadi awal mula terjadinya perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana strategi Tiongkok dalam perang dagang dengan Amerika Serikat?

C. Kajian Literatur

Sudah cukup banyak penelitian yang membahas mengenai perang dagang AS-Tiongkok, dalam pembahasan ini penulis akan memaparkan beberapa penelitian yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini. Literatur pertama adalah artikel jurnal yang berjudul “Analisis kebijakan

tarif maupun non tarif Amerika Serikat terhadap Tiongkok dalam perang dagang” yang ditulis oleh Risyah Amanda Cahyani (Cahyani, 2020). Dalam penelitian ini membahas mengenai kepentingan dan strategi Amerika Serikat menghadapi Tiongkok dalam perang dagang. Dapat disimpulkan dari hasil penelitian tersebut bahwa pemberian tariff yang diberlakukan AS terhadap Tiongkok bukanlah karena alasan kecurangan dari Tiongkok dalam melakukan perdagangan internasional seperti yang dituduhkan AS, melainkan untuk memperoleh hegemoni dalam sistem Internasional. Hal itupun dibuktikan dari kepentingan AS yang menginginkan Tiongkok untuk merubah struktur kebijakannya dengan dalih kecurangan Tiongkok dalam praktik perdagangan Internasional, sehingga dengan dirubahnya sistem maupun kebijakan ekonomi Tiongkok sesuai dengan yang diharapkan oleh Amerika Serikat maka perdagangan internasional akan menguntungkan bagi pihak AS.

Literatur kedua adalah artikel jurnal dengan judul “Tiongkok: Analisa *Balance of Power* dalam perang dagang antara Amerika Serikat dengan Tiongkok pada tahun 2018” yang ditulis oleh Khakimatul Khoiriyah (Khoiriyah, 2020). Penelitian ini berisikan mengenai hal-hal dari Tiongkok yang dianggap oleh AS sebagai suatu ancaman, yang kemudian mendorong AS untuk melakukan kebijakan proteksionisme. Dapat disimpulkan dari penelitian ini bahwa Tiongkok telah mengusakan dalam menyusun strategi yang dapat mendorong Tiongkok untuk meningkatkan kegiatan perekonomiannya, di mana di antaranya dengan adanya proyek raksana Jalur Sutra China dan *Made in China 2025*, hal ini pun kemudian menjadi

ancaman bagi Amerika Serikat karena dengan adanya proyek tersebut maka Tiongkok akan dapat memiliki aliansi kerjasama perekonomian yang sangat besar dan dapat mempermudah Tiongkok dalam melakukan kegiatan produksi hingga pendistribusian produk-produk Tiongkok ke negara lain. Di samping itu Tiongkok juga memanfaatkan smart powernya dengan melakukan kemajuan dalam bidang riset dan pengembangan teknologi yang membuat AS merasa terancam dan melakukan pelarangan terhadap perusahaan AS dalam melakukan kerjasama maupun perdagangan dengan perusahaan teknologi dari Tiongkok.

D. Kerangka Teori

Dalam upaya menjelaskan Strategi Kebijakan Tiongkok dalam Perang Dagang, penulis menggunakan Teori Perdagangan Nasionalis atau merkantilisme. Teori ini akan digunakan dalam menjawab pertanyaan bagaimana strategi Tiongkok di bawah Presiden Xi Jinping dalam perang Dagang AS-Tiongkok, serta faktor-faktor yang mendasari pengambilan keputusan tersebut.

Teori Merkantilisme

Merkantilisme memandang perekonomian internasional sebagai gelanggang konflik antar kepentingan nasional negara-negara dibandingkan sebagai area kerjasama yang bertujuan untuk saling menguntungkan. Dengan kata lain teori ini menganggap bahwa ekonomi merupakan instrumen politik dan menjadi dasar bagi kekuatan politik suatu negara. Sehingga negara harus merasa khawatir dengan profit perekonomian yang didapatkan oleh negara lain karena kekayaan materi suatu negara dapat

menjadi dasar kekuatan militer dan politik negara tersebut yang dapat digunakan untuk menghadapi negara-negara lainnya atau merkantilisme memandang kegiatan perekonomian antar negara ini bersifat *zero sum game* di mana keuntungan yang didapatkan oleh suatu negara merupakan kerugian bagi negara lain (Sarensen, 2016).

Menurut Robert Gilpin, persaingan ekonomi antar negara dalam Merkantilisme dapat dibedakan kepada dua bentuk, yakni *Benign mercantilism* (Merkantilisme Lunak/ramah) dan *Malevolent mercantilism* (Merkantilisme Agresif/keras) (Sarensen, 2016). Pada merkantilisme agresif/keras negara berupaya untuk meningkatkan perekonomian negaranya dengan cara eksploitasi seperti adanya kegiatan ekspansi dan imperialisme terhadap negara lain seperti yang dilakukan oleh kolonial bangsa Eropa di Asia dan Afrika. Sementara itu pada merkantilisme lunak negara berupaya melindungi dan memelihara kepentingan ekonomi nasionalnya dari ancaman eksternal, serta memperoleh keuntungan perdagangan. Hal tersebut dapat terlihat dari negara yang mengambil keputusan kebijakan proteksi yang cenderung dilakukan untuk menyaingi negara-negara lain. Pengambilan keputusan tersebut tentu tidak terlepas dari kepentingan negara untuk memperoleh keuntungan perdagangan sebanyak mungkin sehingga dapat meningkatkan kekayaan nasionalnya. Meskipun demikian dalam praktik merkantilisme lunak tidak mempengaruhi secara negatif terhadap negara lain dan tidak memicu perang antar negara.

Merkantilisme memandang bahwa kemampuan ekonomi dan politik-militer bersifat saling melengkapi, di mana dengan tercapainya kekuatan ekonomi yang besar akan mendukung pula pengembangan politik-militer negara tersebut, dan begitupun sebaliknya dengan kuatnya militer dan politik suatu negara dapat memperkuat kekuatan ekonomi negaranya. Hal ini tentunya sangat bertolak belakang dengan pandangan Liberalisme yang memandang bahwa kesejahteraan ekonomi dapat dicapai melalui perdagangan bebas dan membangun relasi dan kerjasama yang baik antar negara tanpa adanya pengaruh dari kekuatan militer.

Seorang tokoh ekonom nasionalis Friedrich List mengemukakan bahwa pentingnya campur tangan negara dalam kegiatan ekonomi yang dinilai dapat membantu dalam keberhasilan perekonomian negara tersebut, karena pembangunan ekonomi tidak hanya semata-mata berlandaskan dari segi efisiensi, keunggulan komparatif, serta pilihan-pilihan produksi tertentu tanpa adanya keterlibatan dari pengaruh politik, atau dapat dikatakan bahwa kesejahteraan suatu negara semata-mata tidak hanya bergantung kepada banyaknya kekayaan, melainkan sejauh mana negara tersebut telah mengembangkan kekuatan produksinya.

Tiongkok dalam upayanya menghadapi Amerika Serikat pada perang dagang jika diamati dengan teori merkantilisme dapat dikaitkan bahwa pemerintah Tiongkok memberikan pengaruh yang sangat besar dalam mengambil keputusan untuk strategi-strategi yang dilakukan dalam menghadapi Amerika Serikat, dimulai dari pemberian pembalasan Tariff perdagangan, melakukan pengaduan ke WTO mengenai penetapan

kebijakan tariff yang di lakukan oleh Amerika Serikat, dan memanfaatkan rendahnya nilai tukar mata uang yuan untuk semakin meningkatkan ekspor nya ke AS, yang tentunya hal tersebut tidak terlepas dari adanya kepentingan Tiongkok untuk melindungi secara tidak langsung kekuatan ekonomi politik nya di dunia internasional dan menghalagi hegemoni AS yang dinilai kebijakannya dapat merugikan bagi Tiongkok, atau bisa dikatakan strategi-strategi Tiongkok dalam perang dagang ini merupakan bentuk proteksi ekonomi dan tanggung jawab pemerintah.

E. Hipotesa

Strategi Tiongkok dalam perang dagang terhadap Amerika Serikat tahun 2018-2020 memanfaatkan kebijakan-kebijakan yang bersifat *benign mercantilism* seperti melakukan balasan tariff, melakukan protes ke WTO, serta memanfaatkan rendahnya nilai tukar mata uang.

F. Metode Penelitian

1. Tipe penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitik, di mana penelitian deskriptif analitik memberikan suatu gambaran tentang objek yang diteliti, apa yang diteliti melalui data yang telah terkumpul. Dalam penelitian ini penulis berupaya menjelaskan mengenai strategi yang dilakukan oleh Tiongkok dalam perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok.

2. Teknik pengumpulan data dan sumber data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan informasi dan data menggunakan teknik *library research* atau studi pustaka dengan jenis sumber data yang digunakan adalah sumber sekunder, di mana penulis menggunakan sumber-sumber seperti jurnal, artikel dan buku.

3. Teknik analisa data

Teknik analisa yang digunakan dalam penelitian ini yakni dengan menggunakan metode kualitatif yang terfokuskan pada pengamatan terhadap suatu fenomena yang ada.

4. Tujuan penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi beserta alasan dasar Tiongkok mengambil tindakan terhadap Amerika Serikat dalam perang dagang.

5. Jangkauan penelitian

Penelitian diambil dari dimulainya pemberian tariff yang diumumkan oleh Presiden Donald Trump pada tahun 2018 yang dianggap sebagai awal mula terjadinya perang dagang dengan Tiongkok hingga pada akhir tahun 2020 penelitian ini dilakukan.

G. Sistematika Penulisan

a) BAB I: Pendahuluan

Pada pembahasan BAB I akan memaparkan secara singkat mengenai alasan pemilihan judul dan topik, latar belakang perang dagang AS-

Tiongkok, rumusan masalah, kerangka teori, hipotesa, dan metode penelitian

b) BAB II: Hubungan Amerika Serikat dan Tiongkok, dan Perang dagang

Pada pembahasan BAB II akan memaparkan hubungan bilateral Tiongkok dengan Amerika Serikat, serta kronologi perang dagang

c) BAB III: Langkah Langkah Tiongkok dalam Perang dagang

Pada pembahasan BAB III akan memaparkan mengenai perang dagang antara Amerika Serikat dengan Tiongkok, serta strategi Tiongkok di dalamnya.

d) BAB IV: Kesimpulan

Dalam pembahasan BAB IV akan menjelaskan secara singkat kembali pemaparan-pemaparan yang telah dijelaskan di bab-bab sebelumnya.